

Analisa Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Tahun 1959 - 1966

Bentuk Negara

- Bentuk negara pada saat periode pemerintahan 1959 - 1966 adalah Demokrasi terpimpin.
- Hal tersebut dikarenakan terjadi pemberontakan dimana - mana oleh karena itu presiden soekarno mencanangkan berlakunya demokrasi terpimpin.

Dekret Presiden

- Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan dekrit presiden 5 Juli 1959
- Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara

Isi Dekrit Presiden

- Pembubaran konstituante
- Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
- Pembentukan MPRS dan DPAS

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku antara tahun 1959 - 1966 yaitu dari dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno

Pengertian demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme, dan otoraksi diktaktor.

Dalam arti formil adalah sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat bila tidak berhasil, keputusan diserahkan ke presiden.

Prinsip demokrasi terpimpin

- Pembicaraan mengenai persoalan tersebut di tangguhkan.
- Penyelesaian mengenai persoalan tersebut diserahkan kepada pimpinan
- Pembicaraan mengenai persoalan tersebut ditiadakan

Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin.

Ciri-ciri umum :

- Menetapkan pembubaran konstituante
- Menetapkan bahwa UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu singkat

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin :

- Tahun 1960 presiden membubarkan DPR
- Pengangkatan presiden soekarno seumur hidup
- Pengangkatan ketua MPR dan ketua DPR Gotong Royong sebagai menteri.
- Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif

- Presiden berhak mengambil keputusan dalam lembaga legislatif
- Terjadi penyelewengan di bidang perundang – undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden (penpres)
- Didirikannya badan ekstra konstitusional

Perjuangan Membebaskan Irian Barat

Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat :

- Diplomasi
- Konfrontasi Politik dan Ekonomi
- Konfrontasi Militer

Perjuangan Diplomasi

- Secara bilateral melalui perundingan dengan Belanda
- Diplomasi dalam forum PBB

TERIMA KASIH
atas
perhatiannya